

Menteri KP Pastikan Nelayan Sejahtera dengan Program PNBP Pascaproduksi



Realitarakyat.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, memastikan program prioritas peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema pascaproduksi, hasilnya akan digunakan seutuhnya untuk perbaikan subsektor perikanan tangkap secara nasional.

Mulai dari kesejahteraan nelayan sampai perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia menjadi lebih modern dan higienis.

Hal ini disampaikan Menteri Trenggono saat bertemu puluhan perwakilan nelayan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Jumat (21/5/2021).

Para nelayan ini sebelumnya menolak pemberlakuan pembayaran PNBP pascaproduksi lantaran dianggap memberatkan nelayan. Sehingga di pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Menteri KP Trenggono ingin mendengar langsung kekhawatiran para nelayan.

“Saya bisa memahami dan menyelami apa yang terjadi di benak bapak-bapak semua. Bukan hanya di Pati, tapi seluruh Indonesia,” ujar Menteri KP Trenggono membuka diskusi.

Menteri KP Trenggono menjelaskan, pembayaran PNBP Pascaproduksi sejauh ini belum diterapkan. Dia pun membeberkan hal-hal yang menjadi dasar program tersebut akhirnya dibentuk. Mulai dari data nilai produksi perikanan tangkap yang tidak sebanding dengan jumlah penerimaan negara, di mana setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah sementara yang diterima negara hanya ratusan miliar.

Alasan lainnya yaitu kondisi infrastruktur pelabuhan yang masih perlu perbaikan sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim. Lalu belum meratanya kesejahteraan nelayan di Indonesia, sehingga program pembayaran PNBP pascaproduksi sejauh ini menjadi solusi terbaik untuk mengentaskan persoalan yang ada.

“Hasil peningkatan PNBP itu untuk membantu bapak-bapak nelayan sebagian, sebagian lagi untuk nelayan tradisional, dan sebagian lagi untuk infrastruktur dan teknologi. Melihat nelayan yang tidak maju, hati saya menangis,” tegasnya.

Menurutnya, bila nantinya program tersebut diterapkan maka tidak ada lagi

pungutan untuk pengurusan izin kapal. Langkah ini juga menurutnya membantu para nelayan, sebab besaran PNBP sesuai dengan hasil tangkapan sehingga nelayan tidak rugi. Nelayan maupun ABK nantinya juga mendapat jaminan sosial meliputi asuransi kesehatan, kecelakaan hingga jaminan hari tua yang selama ini belum tersedia bagi para nelayan.

Sejalan dengan program prioritas ini juga, tata kelola subsektor perikanan tangkap turut diperbaiki. Seperti pengelolaan area penangkapan guna mengantisipasi terjadinya over-fishing dan penerapan teknologi di pelabuhan dan dalam kapal untuk menjamin adanya ikan hasil tangkapan serta keselamatan nelayan.

Prinsip ekonomi biru penting diterapkan sebagai jaminan proses produksi perikanan tidak mengancam keberlanjutan ekosistem perikanan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalamnya juga berjalan berkesinambungan. Penerapan prinsip ini juga meningkatkan daya tawar hasil perikanan Indonesia di pasar dunia.

“Saya minta seluruh pelabuhan perikanan di bawah KKP menjadi pelabuhan yang bersih, dan nelayannya nyaman, menggunakan sepatu boot, seragam bagus. Ini yang jadi pikiran kita. Melalui program prioritas harapannya ikan-ikan dari Indonesia bisa merajai pasar dunia karena proses penangkapannya yang bisa ditelusuri dan kualitasnya yang baik,” tegasnya.

Mendengar penjelasan Menteri KP Trenggono, para nelayan akhirnya menyambut baik program prioritas tersebut. Mereka bahkan siap melakukan diskusi lebih lanjut dengan kementerian untuk mengulas implementasi pembayaran PNBP pascaproduksi.

“Kami sampaikan terima kasih bahwa ternyata Pak Menteri bisa menerima apa yang kita keluhkan. Kalau dari tujuannya (program prioritas) sangat mulia. Cuma nanti kita harus bicarakan lebih lanjut mengenai pengenaannya. Seperti yang kami sampaikan supaya penuh keadilan bahwa satu sumber daya ikan itu kalau ingin dikenakan ya harus dikenakan semua. Kalau tujuannya sepakat, untuk kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Wakil Ketua Mitra Nelayan Sejahtera, Siswo Purnomo.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini. Ini merupakan diskusi kedua kalinya, setelah sebelumnya nelayan melakukan pertemuan dengan Plt. Dirjen Perikanan Tangkap. (ndi)